

VISI, MISI dan PROGRAM

H. Zumi Zola Zulkifli, STP, MA

DR. Drs. H. Fachrori Umar, MHum

**CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI
TAHUN 2016-2021**

BAB I

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

1. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sejalan dengan dimulainya pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA).
2. Program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi. Hutan dan Lahan. Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan, dengan pertimbangan bahwa sekitar 70% hutan Jambi masih memiliki tutupan hutan dengan kategori baik.
3. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (Panther atigris sumatrae), Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatraensis), Gajah Sumatera (Elephas maximus) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (Rafflesiahaselti), Rafflesia arnoldi , Amorphopalus titanum dan berbagai jenis kekayaan
4. Permasalahan Pulau Berhala dengan provinsi tetangga yaitu Provinsi Kepulauan Riau merupakan agenda yang harus mendapat perhatian kembali untuk pembangunan lima tahun ke depan.
5. Pengembangan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terutama di Provinsi Jambi dengan garis pantai yang panjang (sebagai sumberdaya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan lainnya. Kegiatan perikanan tangkap dan budi daya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis bisa didukung dengan kawasan industri, merupakan potensi lainnya yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut.
6. Pemenuhan infrastruktur dasar seperti infrastruktur transportasi, listrik, dan air untuk masyarakat luas yang merupakan tujuan pembangunan yang harus dicapai. Isu ini menjadi sangat penting karena pemenuhan infrastruktur dasar ini menjadi prasyarat utama berjalannya proses pembangunan secara baik. Adalah suatu kemustahilan pembangunan akan berjalan dengan baik jika infrastruktur transportasi tidak memadai, listrik dan air tidak tersedia.
7. Program Community Development (CD) atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk kepedulian pihak swasta terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan pembangunan ekonomi daerah melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Hal ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam

- menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi.
8. Penyediaan ruang dan tempat usaha yang layak, nyaman, aman dan memadai bagi pelaku-pelaku ekonomi terutama pada sektor-sektor informal dan penataan Ruang Terbuka Hijau.
 9. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal dan terbarukan antara lain seperti Pengembangan Pusat Agribisnis, terutama untuk pasar-pasar domestik dan pasar regional.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025 dengan pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi JAMBI YANG MAJU, MANDIRI , ADIL DAN SEJAHTERA , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang tujuan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
 11. Berpedoman pada berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jambi sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Jambi. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan melalui penyerasian antar pembangunan sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam, yang berazaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan melalui pembagian kawasan lindung dan budi daya dengan topografi dan zona wilayah;
 12. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2016 – 2021, fokus pembangunan di arahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pemerataan pembangunan beserta hasil-hasil pembangunan; kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan; membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumberdaya daerah serta pengelolaannya.

BAB II

PERMASALAHAN SEKARANG

1. Infrastruktur Daerah

Transportasi

1. Infrastruktur transportasi darat yang masih rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah provinsi Jambi maupun dari provinsi Jambi ke Provinsi tetangga. Terutama dari kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran.
2. Kurangnya akses perhubungan untuk daerah pantai dan pulau terluar di bagian timur Provinsi Jambi,
3. Masih adanya desa yang belum terjangkau oleh sarana transportasi darat.
4. Masih terjadinya pembebanan berlebihan (overloading) pada jalan, terutama pada lintas Timur dan Barat Sumatera yang melalui Provinsi Jambi.
5. Masih kurangnya pemanfaatan transportasi sungai, danau dan laut yang merupakan transportasi tradisional masyarakat Jambi. Transportasi ini relatif lebih murah karena mampu mengakomodasi kapasitas angkut yang lebih besar dan biaya perawatan sarana transportasi yang lebih rendah. Transportasi ini dapat dimanfaatkan terutama untuk angkutan barang seperti hasil tambang dan hasil pertanian dalam arti luas.
6. Masih kurangnya sarana perhubungan udara. Mendorong bandara di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo menjadi bandar udara internasional, dan membangun bandara udar kerinci.
7. Tidak tersedianya transformasi kereta yang menghubungkan antar kabupaten/ kota se Propinsi Jambi

Kelistrikan

1. Kurangnya tenaga listrik yang berdampak pemadaman listrik. (Kebutuhan listrik Provinsi Jambi 181,07 MW sementara kemampuan hanya 155 MW).
2. Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam seperti Gas, Batu bara, Sungai dan cangkang sawit sebagai Pembangkit Tenaga Listrik.

Pertanian

1. Kurangnya infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi. Infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan palawija guna terwujudnya ketahanan pangan Provinsi Jambi.

2. Sosial Budaya

Pendidikan

1. Belum meratanya sebaran pendidikan di kabupaten/kota yang menyebabkan perbedaan APK/APM yang mencolok antara kabupaten dan kota.
2. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan prasarana seperti buku, alat-praktik, alat peraga dan alat-alat laboratorium yang belum memadai.
3. Distribusi guru dan tenaga pendidik yang kurang merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil sesuai dengan standar pelayanan minimal.
4. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah serta kesadaran masyarakat untuk bersekolah yang masih relatif rendah.
5. Pelaksanaan muatan lokal yang masih bersifat umum dan belum menyentuh langsung terhadap kepentingan daerah masing-masing.
6. Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang profesional.

Kesehatan

1. Masih terdapatnya gizi buruk
2. Masih tingginya angka kematian bayi di Provinsi Jambi.
3. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
4. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.
5. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Jambi baik secara kuantitas maupun kualitasnya dan tenaga kesehatan yang memadai apalagi di wilayah-wilayah terpencil.
6. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan penyebaran yang tidak merata.
7. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan.
8. Terbatasnya kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Pariwisata dan Budaya

1. Belum optimalnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.
2. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur.
3. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupun budaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah.

4. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.
5. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

Kepemuda dan Olahraga

1. Kurangnya minat pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan.
2. Tingginya jumlah pemuda yang terlibat dalam narkoba dan HIV/AIDS.
3. Kurangnya pengembangan budaya olah raga di kalangan masyarakat luas.
4. Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga serta tingkat pendidikan pemuda yang masih relatif rendah.
5. Belum optimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olah raga daerah.
6. Semakin berkurangnya ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah.

3. Perekonomian Daerah

Keuangan Daerah

1. Tingginya tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada, Penerimaan PAD Provinsi Jambi masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama yang besarnya pada tahun 2010 mencapai 85 persen dari total penerimaan PAD Provinsi Jambi pada tahun tersebut.
3. Perbedaan karakteristik potensi sumberdaya yang berbeda setiap wilayah. Kabupaten/Kota dengan kapasitas fiskal terbesar adalah Kota Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Bungo, sedangkan kapasitas fiskal terendah di Kabupaten Merangin mengakibatkan adanya kesenjangan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap peranan PKB dan BBN-KB sebagai sumber dana pembangunan daerah.

Sumberdaya Ekonomi

1. Turunnya ekspor yang disebabkan biaya ekonomi tinggi; rendahnya infrastruktur ekspor seperti pelabuhan, peti kemas dan angkutan kapal laut serta rendahnya infrastruktur jalan ke pelabuhan; ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah), lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.
2. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.
3. Masih rendahnya pendapatan petani yang tercermin dari nilai NTP petani yang menunjukkan bahwa kemampuan daya beli petani di Jambi masih rendah karena rendahnya pendapatan.
4. Berubahnya lahan-lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura ada yang beralih (konversi) ke subsektor lain seperti perkebunan sawit, sehingga luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura kecenderungan terjadi penurunan, jika tidak diikuti dengan pembukaan lahan – lahan baru.
5. Masih rendahnya penambahan populasi ternak dari potensi (kapasitas tampung) yang ada.
6. Rendahnya produktivitas yang umumnya terdapat di daerah rawa/ pasang surut.
7. Rendahnya kualitas beras yang dihasilkan, karena terbatasnya mesin perontok gabah dan lantai jemur.
8. Terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanian.
9. Masih tingginya desa rawan pangan di Provinsi Jambi.
10. Pola konsumsi masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras).
11. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan.
13. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki tertinggal jauh dengan nelayan asing yang masuk ke perairan Jambi.
14. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha.
15. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarinya.
16. Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, cold storage, jenis alat tangkap.
17. Masih tingginya pencurian ikan dan terjadinya over fishing, serta pola penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.
18. Masih ada oknum masyarakat yang menggunakan alat tangkap ikan terlarang seperti menggunakan tuba/setrum dan pencurian ikan di laut oleh Kapal Asing.
19. Belum merata pemanfaatan teknologi budidaya ikan, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

20. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
21. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan mengakibatkan tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah.
22. Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan.
2. Belum optimumnya perhatian pada perkebunan rakyat, produksi pangan, pertanian, dan perikanan dalam menghadapi kendala dan keterbatasan dukungan kapasitas sumberdaya alam.
3. Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih).
4. Adanya konflik atau ketidakselarasan fungsi lahan, terutama dengan fungsi kawasan hutan konservasi dan lindung dan keterbatasan permodalan nasional, sehingga ketergantungan terhadap investor asing masih cukup tinggi.
5. Rendahnya minat berinvestasi untuk perusahaan mineral dan batubara, disebabkan masalah kepastian hukum dan belum optimalnya sistem insentif untuk menarik masuknya investor baru dalam usaha pertambangan.
6. Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumberdaya manusia profesional dalam penguasaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan.
7. Permasalahan reklamasi tambang belum dikelola secara ekologis dan ekonomis, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
8. Masih tingginya kawasan hutan berstatus ' o p e n a c c e s s ' merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan.
9. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air yang tersedia pada musim hujan dan pada musim kemarau, menyebabkan ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Dan musim kemarau, kekeringan yang berkepanjangan.
10. Tingginya tingkat pencemaran Sungai Batanghari berdampak pada kualitas mutu air yang di pakai sebagai sumber air minum .

4. Tata Pemerintahan

Pemerintahan Umum

1. Kurang efektivitas Peraturan Perundang-undangan dikarenakan masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah.
2. Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya, reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan.
3. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah.
4. Permasalahan budaya kerja, produktif di lingkungan birokrasi, budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Belum maksimalnya menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
6. Masih terkendala regulasi, system pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Dan masih kurangnya unit pelayanan public belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik.
7. Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
8. Masih kurangnya kesadaran hukum serta penghormatan terhadap HAM. Hal ini ditandai dengan masih banyak kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.

Politik

1. Ada anggapan yang keliru bahwa pemilu indentik dengan imbal jasa. Sehingga menimbulkan akses negatif terhadap berbagai kecurangan dalam pemilu, kondisi ini belum mampu mengubah realitas rendahnya peran politik perempuan dalam lembaga-lembaga politik.
2. Budaya patriakal yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan, dan masih banyaknya dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih belum dianggap sebagai kelompok yang berhak memiliki peran independen dalam melakukan aktualisasi diri di bidang

sosial dan politik, serta belum memiliki akses yang sama ke dalam sumber-sumber pengetahuan dan pendidikan.

3. Konflik internal dalam pergantian kepengurusan, belum berjalan optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnya kemampuan dan kapasitas SDM kader dan fungsionaris partai dalam membangun dan mempraktikkan dasardasar demokrasi, dan lemahnya sistem demokrasi internal dalam partai politik. Akibatnya kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi berkurang.
4. Rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat. Berdampak masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik, dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

III. POTENSI PROVINSI JAMBI

1. Letak Geografis

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 00 45' sampai 20 45' lintang selatan dan antara 1010 10' sampai 1040 55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Luas Wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km² dengan luas daratan 50.160,05 Km² dan luas perairan sebesar 3.274,95 Km² terdiri dari :

- Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km² (6,69%)
- Kabupaten Merangin 7.679 Km² (15,31%)
- Kabupaten Sarolangun 6.184 Km² (12,33%)
- Kabupaten Batanghari 5.804 Km² (11,57%)
- Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km² (10,62%)
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 Km² (10,86%)
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.649,85 Km² (9,27%)
- Kabupaten Tebo 6.461 Km² (12,88%)
- Kabupaten Bungo 4.659 Km² (9,29%)
- Kota Jambi 205,43 Km² (0,41%)
- Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,78%)

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 Km² atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 Km² dan 6.184 Km².

2. Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia (PNS)

Wilayah Administrasi Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Terdapat 138 kecamatan, 1.381 desa dan 168 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerinci terdiri dari 16 kecamatan, 287 desa dan 2 kelurahan.
- b. Merangin terdiri dari 24 kecamatan, 207 desa dan 10 kelurahan
- c. Sarolangun terdiri dari 10 kecamatan, 149 desa dan 9 kelurahan
- d. Batang Hari terdiri dari 8 kecamatan, 101 desa dan 13 kelurahan

- e. Muaro Jambi terdiri dari 11 kecamatan, 148 desa dan 5 kelurahan
- f. Tanjung Jabung Timur terdiri dari 11 kecamatan, 73 desa dan 20 kelurahan
- g. Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 kecamatan, 104 desa dan 20 kelurahan
- h. Tebo terdiri dari 12 kecamatan, 107 desa dan 5 kelurahan
- i. Bungo terdiri dari 17 kecamatan, 142 desa dan 12 kelurahan
- j. Kota Jambi terdiri dari 8 kecamatan dan 62 kelurahan
- k. Kota Sungai Penuh terdiri dari 8 kecamatan, 65 desa dan 4 kelurahan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah keseluruhan berjumlah 6.365 orang yang terdiri dari 3.512 orang laki-laki (55,18 persen) dan 2.853 orang perempuan (44,82 persen). Ditinjau dari segi golongan kepangkatan terbagi menjadi; golongan I sebanyak 96 orang (1,51 persen), golongan II sebanyak 1.449 orang (22,77 persen), golongan III sebanyak 4.220 orang (66,30 persen), dan golongan IV 600 (9,43 persen).

Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil terbanyak adalah Strata 1 (S1) 2.718 orang (42,70 persen), disusul Sekolah Menengah Atas (SMA) 2.024 orang (32,08 persen), Diploma I/IV 812 orang (12,76 persen), Pasca Sarjana (S2) 531 orang (8,34 persen), SMP 151 orang (2,37 persen), Sekolah Dasar (SD) 116 orang (1,63 persen), dan Doktor (S3) 7 orang (0,11 persen).

3. PENDUDUK DAN TENAGA KERJA

Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2013 sebanyak 3.317.034 jiwa, pada tahun 2012 sebanyak 3.242.814. Selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 2,29 persen. Kepadatan penduduk tahun 2013 menurut Kabupaten/Kota:

- Kabupaten Kerinci 97 orang/km²
- Kabupaten Merangin 47 orang/km²
- Kabupaten Sarolangun 43 orang/km²
- Kabupaten Batanghari 44 orang/km²
- Kabupaten Muaro Jambi 71 orang/km²
- Kabupaten Tanjab Timur 39 orang / km²
- Kabupaten Tanjab Barat 65 orang/km²
- Kabupaten Tebo 50 orang/ km²
- Kabupaten Bungo 71 orang/ km²
- Kota Jambi 2.771 orang/ km²
- Kota Sungai Penuh 217 orang/km²

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi keadaan Agustus tahun 2013 mencapai 1.452.832 orang yang terdiri dari 1.382.471 orang bekerja dan 70.361 orang pencari kerja/pengangguran.

Jumlah pencari kerja yang mendaftar di dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2013 sebanyak 16.983 orang atau naik 30,75 persen dari tahun sebelumnya

4. SOSIAL

Pembangunan sektor pendidikan formal mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi dan pendidikan non formal berupa pendidikan dan latihan berbagai bidang pengetahuan ketrampilan yang diperlukan untuk pembangunan serta pembinaan generasi muda dan olah raga dalam mempersiapkan generasi yang sehat jasmani dan rohani.

Jumlah sekolah negeri dan swasta di Provinsi Jambi kondisi 2013 adalah : - TK : 680 sekolah - SD : 2.370 sekolah - SLTP : 576 sekolah - S M A : 191 sekolah - S M K : 131 sekolah. Sedangkan jumlah guru negeri & swasta : - TK : 3.199 orang - SD : 27.760 orang - S LTP : 9.154 orang - S M A : 4.614 orang - S M K : 2.886 orang

Jumlah murid negeri dan swasta : - TK : 37.907 orang - SD : 407.583 orang - S L T P : 105.968 orang - S M A : 57.087 orang - S M K : 23.056 orang

5. PERTANIAN

Luas lahan sawah di Provinsi Jambi pada tahun 2013 seluas 167.623 hektar. Jika dilihat dari sistem irigasinya, 25,13 persen merupakan irigasi tadah hujan dan 29,57 persen irigasi pasang surut. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi merupakan wilayah potensi tanaman pangan.

Lahan sawah terluas di Provinsi Jambi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (39.301 hektar), diikuti oleh Kabupaten Muaro Jambi dan Kerinci masing-masing hektar 24.620 dan 22.977 hektar, sedangkan paling sedikit di Kota Jambi 1.676 hektar. Padi sawah Provinsi Jambi tahun 2013 meningkat sebesar 6,38 % dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya. Padi ladang menurun sebesar minus 15 % sehingga total produksi padi mengalami peningkatan sebesar 2,30 %. Palawija : Produksi palawija seperti ubi kayu turun 2,63%; jagung turun 19 %; ubi jalar naik 37,32%; dan kedelai turun 7,54 %.

Perkebunan daerah Jambi pada umumnya adalah Perkebunan Rakyat. Produksi perkebunan rakyat yang terbesar adalah karet memiliki luas tanaman 662.213 hektar dengan produksi 323.271 ton pada tahun 2013. Komoditas andalan lainnya yaitu kelapa sawit dengan produksi 1.555.697 ton serta kelapa dalam 106.869 ton.

Luas kawasan hutan di Provinsi Jambi seluas 2.118.298 hektar, terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 181.425 hektar dan kawasan hutan konservasi seluas 677.232 hektar, hasil kehutanan Provinsi Jambi yang terbesar adalah pulp, produksi tahun 2011 adalah 717.101,87 m³ atau turun 10,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Komoditi kedua terbesar adalah kayu bulat kecil sebesar 440.788,21 ton atau mengalami kenaikan produksi sebesar 81,97 persen
Luas kawasan hutan di Provinsi Jambi seluas 2.118.298 hektar, terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 181.425 hektar dan kawasan hutan konservasi seluas 677.232 hektar

Tahun 2013, ternak sapi masih mendominasi jenis ternak besar yaitu dengan jumlah populasi sebesar 119.049 ekor atau menurun 15 persen dari tahun sebelumnya dengan jumlah populasi terbanyak berada di Kabupaten Bungo. Sedangkan ternak kecil terbanyak adalah hewan kambing sebesar 410.864 ekor dengan populasi di Kota Jambi. Adapun ternak unggas terbesar adalah ayam kampung sebesar 11.519.915 ekor.

Potensi kelautan hanya berada di dua kabupaten yaitu Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat dengan masing-masing produksi 22.748,0 ton dan 24.964,5 ton. Sedangkan perikanan darat tersebar di semua kabupaten/kota terbagi menjadi perairan umum dan budidaya. Secara keseluruhan hasil produksi perikanan darat sebesar 52.810,8 ton dengan konsentrasi terbanyak di Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan produksi perikanan hasil budidaya sebanyak 45.265,8 ton dimana Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemegang andil terbesar budidaya ikan patin.

6. PERINDUSTRIAN, DAN PERTAMBANGAN

Perindustrian di Provinsi Jambi dari tahun 1998-2013 mengalami peningkatan baik dari unit usaha, tenaga kerja, investasi dan produksinya. Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Provinsi Jambi pada Tahun 2013 sebanyak 100. Jumlah tenaga kerja sebesar 28.535 orang.

Menurut data dari jumlah perusahaan dagang nasional adalah sebanyak 15.959 sedangkan perusahaan asing tidak ada. Volume ekspor jambi awal tahun 2000 adalah sebesar 1.020.433 ton dan volume impornya adalah 90.434 ton dengan demikian terjadi peningkatan untuk volume ekspor sebesar 26,32 persen dan volume impor mengalami penurunan sebesar 11,47 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air.

7. PERDAGANGAN

Potensi perdagangan Provinsi Jambi sangat besar. Ini dapat dilihat perdagangan luar negeri volume ekspor Jambi bulan Januari s/d Desember 2013 sebesar 4.176.137,53 ton sedangkan volume impornya adalah 213.377 ton. Nilai ekspor Provinsi Jambi bulan Januari-Desember 2013 sebesar 1.437.144,09 ribu US Dolar dan impor 275.063,70 ribu US Dolar.

8. TRANSPORTASI, DAN KOMUNIKASI

Panjang Jalan merupakan prasarana untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Peningkatan pembangunan diiringi dengan peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar perdagangan antar daerah. Panjang jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2013 adalah 2.441,41 km terdiri dari jalan kondisi baik 965,26 km, jalan sedang 961,99 km, rusak 372,237 km dan rusak berat 141,922 km. Perhubungan Darat Jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya dari tahun 2008-2013 mengalami kenaikan. Jenis kendaraan terbanyak adalah sepeda motor 1.303.044 buah, mobil penumpang 23.912 buah, mobil barang 61.222 buah dan mobil bus 55.245 buah.

Perhubungan Air Sarana transportasi air salah satu penggunaannya dipergunakan untuk bongkar muat barang yang dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku Jambi. Dan perhubungan udara pada tahun 2013 jumlah kedatangan pesawat ke Jambi sebanyak 4.826 kali dan jumlah keberangkatan pesawat dari Jambi sebanyak 4.826 kali. Penumpang yang datang 639.547 orang dan berangkat 653.319 orang. Frekwensi pesawat yang datang dan berangkat pada tahun 2013 masing-masing mengalami peningkatan 4,30 persen dan 4,36 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah sambungan telepon dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

9. PARIWISATA

Salah satu potensi Provinsi Jambi adalah potensi di bidang pariwisata. Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam kepariwisataan yang menetapkan provinsi jambi sebagai daerah tujuan wisata ke 21, Jambi memiliki peluang untuk mengembangkan kepariwisataannya melalui pengembangan produk-produk jasa pelayanan untuk wisatawan yang akan menuju ke Jambi.

Objek-objek wisata andalan provinsi Jambi antara lain Air Terjun Telun Berasap, Goa Senggiring, Bunga Bangkai di Rantau Panjang 45 km dari kota Muara Bungo, Danau Gunung Tujuh, Cinnamon di Muara Madras Jangkat, Taman Mini Jambi, Objek Wisata Danau Sipin, Gunung Kerinci dan lain-lain.

Sebagai fasilitas penunjang sector pariwisata di Jambi terdapat 163 hotel pada tahun 2013 dengan jumlah kamar naik 13,6 persen dan tempat tidur mengalami peningkatan 13,51 persen. Jumlah malam tamu wisatawan mancanegara yang menginap pada hotel berbintang selama tahun 2013 sejumlah 4.473 orang dan wisatawan domestik 562.586 orang. Dan sarana penunjang kepariwisataan restoran/rumah makan dan tempat wisata masing-masing berjumlah 710 buah dan 226 buah.

10. Perbankan

Seiring dengan berkembangnya perekonomian Jambi menuntut perkembangan jasa keuangan khususnya perbankan untuk membuka cabang/unit di daerah. Sampai dengan tahun 2013 tercatat 378 unit kantor bank, terdiri dari kantor pusat sebanyak 1 unit, kantor cabang 60 unit, kantor cabang pembantu 253 unit, dan kantor kas sebanyak 66 unit. Jumlah ini naik sebesar 23,05 persen dibanding tahun 2011. Meningkatnya jumlah perbankan diiringi dengan meningkatnya posisi giro maupun posisi pinjaman, serta deposito rupiah dan valas bank umum.

11. PENDAPATAN REGIONAL

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi Tahun 2013 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 7,88 persen. Kenaikan ini merupakan pertumbuhan perekonomian secara riil dimana faktor inflasi/deflasi sudah dihilangkan. Sektor bangunan memiliki laju pertumbuhan tertinggi sebesar 20,73 persen, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 12,24 persen, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 9,27 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 8,52 persen, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 7,88 persen, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan 7,41 persen, sektor industri pengolahan 5,69 persen, sektor jasa-jasa 4,80 persen, dan terendah sektor pertambangan dan penggalan sebesar 1,56 persen,

BAB IV. VISI, MISI DAN PROGRAM

VISI

Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021
(JAMBI TUNTAS 2021)

PENJELASAN VISI

1. Provinsi Jambi yang **TERTIB**
Mecakup tata pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintahan kabupaten/kota dengan Provinsi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Terwujudnya kesadaran dan ketaatan publik terhadap perundangan-undangan;
2. Provinsi Jambi yang **UNGGUL**
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Terpenuhinya pelayanan dasar yang berkualitas. Berkembangnya industri hilir yang dapat meningkatkan kualitas produksi dan penciptaan lapangan kerja;
3. Provinsi Jambi yang **NYAMAN** :
Terwujudnya Provinsi Jambi sebagai daerah yang nyaman untuk berinvestasi dari dalam maupun luar negeri. Terwujudnya kehidupan masyarakat aman, tenteram dan bebas dari konflik.
4. Provinsi Jambi yang **TANGGUH** :
Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang siap menghadapi globalisasi. Tumbuh dan berkembangnya produktivitas ekonomi rakyat. Berkembangnya industri hilir yang dapat meningkatkan kualitas produksi dan penciptaan lapangan kerja.
5. Provinsi Jambi yang **ADIL** :
Meningkatnya anggaran daerah yang pro-rakyat, terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan agraria yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.
6. Provinsi Jambi yang **SEJAHTERA**:
Meningkatnya indeks gini masyarakat Jambi. Menurunnya rasio kemiskinan. Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan sosial.

MISI

1. *Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik;*
2. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;*
3. *Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan jaminan kepastian hukum;*
4. *Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri;*
5. *Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;*
6. *Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal;*

PROGRAM

MISI I. *Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik;*

1. Peningkatan manajemen pelayanan, dan integrasi pelayanan melalui pengembangan sistem *e-government* yang terintegrasi dengan kabupaten/kota
2. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan satu pintu, PATEN (kecamatan) dan PATEK (kelurahan).
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik dan pengawasan pembangunan, pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah,
4. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
5. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah/ desa
6. Fasilitasi kerjasama antar desa antar kabupaten/kota, Antar Lembaga, dan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
7. Tambahan penghasilan bagi aparatur desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) per tahun;
8. Peningkatan proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur; berserta Peningkatan Kualitas Pengawasan
9. Peningkatan kualitas dan etos kerja aparatur melalui perbaikan sistem rekrutmen, promosi, mutasi dan rasionalisasi;
10. Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah;
11. Peningkatan quota perempuan dalam jabatan pemerintahan dan kedudukan strategis lainnya;
12. Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif

MISI II. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender,*

1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan cara merubah Rumah Sakit Provinsi dan Rumah sakit Muaro Bungo dari kelas B kelas A sebagai rumah sakit rujukan regional;
2. Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Provinsi Jambi;
3. Pemberian jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu non Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS);
4. Pemberian tambahan penghasilan untuk guru non sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil;
5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan status puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap, rawat inap menjadi rawat inap plus serta pemerataan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya;
6. Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera
7. Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak serta kewaspadaan rawan gizi dan pangan.;
8. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
9. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan
10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah
11. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
12. Peningkatan peran serta masyarakat/swsta dalam penyelenggaraab pendidikan
13. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis;
14. Kuliah gratis untuk 15.000 (lima belas) ribu orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/swasta;
15. Pembangunan sekolah kejuruan (SMK, Poli Teknik), Scien Park dan Techno Park sesuai potensi daerah;
16. Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan fasilitas peralatan kerja dan instruktur yang berkompeten;
17. Perlindungan Ketenagakerjaan
18. Peningkatan fasilitas dan pembinaan olah raga di sekolah menengah dan desa/kelurahan;
19. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan karang taruna;
20. Pemberian tunjangan kesejahteraan, tunjangan pendidikan dan penghargaan bagi olahragawan daerah yang berprestasi;
21. Peningkatan peran lembaga adat dalam pelestarian budaya daerah;
22. Peningkatan fasilitas penunjang pelestarian seni dan budaya daerah;
23. Peningkatan pembinaan generasi muda dan seni budaya melalui menumbuh kembangkan seni dan budaya daerah;
24. Penguatan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender;

MISI III. *Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan jaminan kepastian hukum;*

1. Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat antar daerah kabupaten/kota;
2. Memfasilitasi pembinaan keamanan dan ketertiban;
3. Pembinaan kerukunan dan toleransi antar suku dan antar umat beragama;
4. Pemberian kepastian hukum terhadap hak adat dan hak ulayat masyarakat lokal dan komunitas adat terpencil serta masyarakat transmigrasi;
5. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan masyarakat kurang mampu guna melindungi hak-haknya sebagai warga negara;
6. Pembinaan dan pelatihan keterampilan terhadap eks penyandang penyakit masyarakat;
7. Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

MISI IV. *Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri;*

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan;
2. Peningkatan Nilai Tukar Petani;
3. Peningkatan investasi industri pengolahan dan pemberdayaan petani dalam penguasaan teknologi tepat guna;
4. Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi melalui pemberdayaan dan pendampingan serta akses permodalan akses permodalan;
5. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan dan sentra produksi ekonomi masyarakat;
6. Pengembangan dan promosi industri ekonomi kreatif berbasis komunitas dan komoditas daerah;
7. Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM
8. Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat
9. Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah
10. Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa
11. Peningkatan Daya Tarik Investasi
12. Pengembangan Agribisnis Perkotaan
13. Penyiapan Kawasan Niaga dan Industri yang Ramah Lingkungan
14. Peningkatan Pendapatan Daerah
15. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

MISI V. *Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;*

1. Alokasi bantuan infrastruktur desa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) per desa;
2. Peningkatan Kualitas dan status jalan strategis nasional menjadi jalan nasional;
3. Revitalisasi DAS Batanghari;
4. Peningkatkan status dan sarana pendukung bandara udara;
5. Pengembangan pelabuhan;
6. Pembangunan fasilitas jalur kereta api;
7. Peningkatan infrastruktur listrik daerah melalui optimalisasi sumber daya energi;
8. Pengembangan pembangkit listrik mikro hidro di daerah pedesaan yang potensial;
9. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi;
10. Peningkatkan kualitas penataan drainase yang menghubungkan sungai lintas daerah;
11. Penyediaan eskavator di setiap kecamatan sebagai fasilitas cepat tanggap untuk penataan drainase, normalisasi sungai dan perbaikan sarana pertanian masyarakat lainnya; (didaerah sungai dan rawa)
12. Pengelolaan dan pengembangan Sarana Pengelolaan Air Minum (spam) lintas kabupaten/kota;
13. Pembangunan angkutan massal seperti kereta api antar kabupaten dan kota se Provinsi Jambi

MISI VI. *Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal;*

1. Pelatihan keterampilan kerja, pemberian bantuan kredit mikro bagi masyarakat miskin dan pengangguran;
2. Mendorong semua perusahaan yang investasi di Provinsi Jambi untuk menyediakan kuota yang lebih besar untuk tenaga kerja asal Jambi;
3. Pemberian bantuan sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin/kurang mampu;
4. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha; (koordinasi pemda dengan otoritas moneter/perbankan);

BAB V PENUTUP

Dengan kerendahan hati, izinkan saya H ZUMI ZOLA ZUKIFLI STP, MA dan saudara saya DR. Drs. FACHRORI UMAR, MHum memimpin Provinsi Jambi priode 2016 - 2021 kedepan, Insyaallah Saya dan saudara saya akan berupaya mewujudkan harapan impian masyarakat Provinsi Jambi, mencari solusi yang terbaik untuk provinsi yang kita cintai.

Kepada Allah SWT kita bersera diri, semoga aktifitas menjadi nilai ibadah dan mendapat rido Allah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

CALON GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR

(H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP, MA)

(DR. Drs. FACHRORI UMAR, Mhum)